



**PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**



Bakajang

2023

RENCANA KERJA

KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**



(0752) 55002



Jalan Lintas Sumbar-Riau
Pasar Baru Pangkalan



pangkalan.kotobaru@gmail.com

<https://kec-pangkalan.limapuluhkotakab.go.id>



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

Pangkalan, 4 Agustus 2022



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

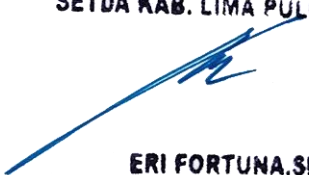
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Akhirnya semoga RENJA (Rencana Kerja) Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini dapat berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan tuntunan pada kita semua.

Pangkalan, 4 Agustus 2022

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU



GUSNI HENDRIK, S.STP.M.PA

NIP. 19790831 199810 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	12
	1.3 Maksud dan Tujuan	16
	1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU TAHUN LALU	19
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru.....	19
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.....	30
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.....	33
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	45
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	46
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	46
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	46
	3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	55
	4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)	55
BAB V	: Penutup.....	65

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun dan Pencapaian Renstra Kec. Pangkalan Koto Baru s/d Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota	20
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	31
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	41
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	46
Tabel 3.1	Program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	48
Tabel 3.2	Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas kecamatan	51
Tabel 4.1	Rumusan pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Dan perkiraan maju 2024 (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)	56
Tabel 4.2	Rencana target kinerja IKU KD/ IKU OPD	60
Tabel 4.3	Rencana Target Kinerja pelayanan perangkat daerah tahun	61
Tabel 4.4	Rencana Keptuhan Pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 2023	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan maksud ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dasar lanjutan yang dipedomani adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal 25 September 2019.

Dalam melakukan Penyusunan Renja PD

- I. Persiapan Penyusunan
- II. Penyusunan Rancangan Awal
- III. Penyusunan Rancangan

- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- V. Perumusan Rencana Kerja
- VI. Penetapan.

Proses Penyusunan :

I. Persiapan penyusunan Meliputi :

- a. Mengusulkan nama-nama personil yang akan mengisi Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2023 ke Bapelitbang untuk dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
- b. Mengadakan orientasi penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.
- c. Kalender Penyusunan Renja

Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun Kalender Penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 027/1/II/SE/BAPELITBANG-LK/2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2023 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2023.

Adapun Jadwal disusun sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangakaln Koto Baru Tahun 2023

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021												2022																																			
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
A	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renja 2023																																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																																
3	Orientasi mengenai Renja Kecamatan Harau																																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021												2022																															
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																												
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2023																																												
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2022																																												
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																												
C	Penyusunan Rancangan Renja																																												

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021												2022																															
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Penyusunan Rancangan Renja																																												
2	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																												
3	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja Kec Harau sudah selaras dengan rancangan awal RKPD																																												

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021												2022																																																			
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli																											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																								
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																																																
D	Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah																																																																
1	Pelaksanaan Forum Gabungan PD oleh Bapelitbang sekaligus merupakan Forum PD masing-masing OPD yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,																																																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021												2022																																							
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli															
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
	program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja PD																																																				
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja																																																				

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021												2022																																											
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli																			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																																								
F	Penetapan Renja																																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021												2022																															
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																												
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																												
3	Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi																																												

II. Penyusunan Rancangan Awal

Pada awal bulan Maret 2022 dilakukan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru oleh tim penyusun hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rencana Kerja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan OPD terkait seperti Bapelitbang, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Koordinasi dilaksanakan pada Bulan Maret 2022.

V. Perumusan Rencana Kerja

Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rencana kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

VI. Penetapan

Dalam hal penetapan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan pemeriksaan akhir dan Koordinasi dengan Bapelitbang tentang Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Dengan telah dilaksanakannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan tidak lagi sebagai wilayah administrasi sebagaimana kita kenal selama ini, akan tetapi kecamatan mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah.

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2023 disusun dengan maksud sebagai :

- 1) Pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023.
- 2) Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja Kecamatan;
- 3) Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2023 adalah:

- 1) Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS),

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD)

- 2) Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.
- 3) Terwujudnya Pelayanan Prima dalam melayani masyarakat.
- 4) Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- 5) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- 6) Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
- 7) Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2022 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2022 yang sudah disahkan. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2021 dan realisasi Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor yang tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Kec. Pangkalan Koto Baru s/d Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2022/(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		
					Target Renja OPD Tahun 2021/(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021/(n-2)	Tingkat Realisasi (%) tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5)	11=(10/4)	
	Usuran Pemerintahan Umum										
5	XX	Kewilayahan									
1	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	60.11			60.11	92,47 %	
1	11	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	100%			12 bulan	100%
1	11	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	100%			12 bulan	100%

1	11	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	7 Unit					7 Unit	100%
1	11	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12 bulan	100%					12 bulan	100%
1	11	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	100%					12 bulan	100%
1	11	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	12 bulan	100%					12 bulan	100%
1	11	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan komputer,laptop,printer dan peralatan kantor lainnya	12 bulan	100%					12 bulan	100%
1	11	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	100%					12 bulan	100%
1	11	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	100%					12 bulan	100%
1	11	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan	100%					12 bulan	100%
1	11	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	100%					12 bulan	100%

1	11	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan atau majalah dan Peraturan Perundang-undangan serta dokumen perencanaan	-	-					-	-
1	11	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	100%					12 bulan	100%
1	11	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	100%					12 bulan	100%
1	11	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	96.04					96.04	121.56 %
1	11	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Penambahan Ruang Kantor	-	-					-	-
1	11	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan dinas roda 2	-	-					-	-
1	11	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 paket	1 paket					1 paket	100 %
1	11	2	10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubeleur kantor	2 set	1 unit					1 unit	100%

1	11	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	-	-					-	-
1	11	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 paket	1 thn					12 bulan	100 %
1	11	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	1 thn					12 bulan	100 %
1	11	2	42	Rehab Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab gedung kantor	-	-					-	-
1	11	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	96.04					96.04	121.56 %
1	11	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	1 paket	-					-	-
1	11	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khas daerah	1 paket	-					-	-
1	11	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	96.04					96.04	121.56 %

1	11	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur kecamatan	-	-				-	-
1	11	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek peraturan perundang-undangan bagi aparatur Nagari dan Kecamatan	-	-				-	-
1	11	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	60.11				60.11	92,47 %
1	11	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	25 dokumen	25 dokumen				25 dokumen	100 %
1	11	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	16.6%	16.6%				16.6%	100%
1	11	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pilwanag dan Keikutsertaan pada MTQ Tk. Kabupaten serta kegiatan kemasyarakatan lainnya	12 bulan	100%				12 bulan	100%

1	11	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	5 Nagari					5 Nagari	90%
1	11	17	2	Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan	6 nagari	6 nagari					6 nagari	100%
4	XX	1		Sekretariat									
1	11	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	96.04					96.04	121.56 %
1	11	23	6	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 bulan	12 bulan					12 bulan	100 %
1	11	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	5 Nagari					5 Nagari	90%
1	11	24	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya lomba nagari	6 nagari	6 nagari					6 nagari	100%
5	XX	1		Kecamatan									
1	11	xx		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	16.6 %	16.6%					16.6 %	100 %

1	11	xx	xx	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Ditetapkannya APB Nagari tepat waktu	6 nagari	6 nagari					6 nagari	100%
1	11	8	19	Bimbingan, Supervisi, & Pengawasan dana nagari	Terlaksananya penyaluran dana Nagari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	6 nagari	6 nagari					6 nagari	100%
1	11	24	4	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terciptanya keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	6 nagari	6 nagari					6 nagari	100%
1	11	xx	xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Terpantaunya Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan Baik	6 nagari	6 nagari					6 nagari	100%

Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Kec. Pangkalan Koto Baru s/d Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2022/(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja OPD Tahun 2021/(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021/(n-2)	Tingkat Realisasi (%) tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
7				-						
7	01			-						
7	01	01			75	64,53	86,04 %	75	139.53	139,53%
7	01	01	2.01	100	75	64,53	86,04 %	75	139.53	139,53%
7	01	01	2.02	100	75	64,53	86,04 %	75	139.53	139,53%
7	01	01	2.03	100	75	64,53	86,04 %	75	139.53	139,53%

7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100		75	64,53	86,04 %	75	139.53	139,53%
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100		75	64,53	86,04 %	75	139.53	139,53%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100		75	64,53	86,04 %	75	139.53	139,53%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100		75	64,53	86,04 %	75	139.53	139,53%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	100		75	64,53	86,04 %	75	139.53	139,53%
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25		80	90,85	113,56 %	80	170.85	177,50 %
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25		80	90,85	113,56 %	80	170.85	177,50 %
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25		80	90,85	113,56 %	80	170.85	177,50 %
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	100 %		40%	33.3%	83.25 %	40%	73.3%	73.3 %
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari		6 Nagari	6 Nagari	100 %	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25		80	90,85	113,56 %	80	170.85	177,50 %

7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25		80	90,85	113,56 %	80	170.85	177,50 %
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25		80	90,85	113,56 %	80	170.85	177,50 %
7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25		80	90,85	113,56 %	80	170.85	177,50 %
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,25		80	90,85	113,56 %	80	170.85	177,50 %
7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100 %		40%	33.3%	83.25 %	40%	73.3%	73.3 %
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100 %		40%	33.3%	83.25 %	40%	73.3%	73.3 %

Pangkalan, 04 Agustus 2022

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

GUSNI HENDRIX,S.STP.M.PA

NIP. 19790831 199810 1 001

Berdasarkan tabel diatas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2021 yang pencapaian kurang sama dari 80 % diantaranya:

- I. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, antara lain:
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tidak mencapai target disebabkan karena Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu untuk tahun 2021 jumlah nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu hanya 4 Nagari (Nagari Lubuak Batingkok, Sarilamak, Pangkalan Koto Baru dan Taram) sehingga realisasi tahun 2021 sebesar 36,36% belum mencapai target. Pembinaan dan pengawasan telah dilakukan, diharapkan Nagari yang belum bisa menetapkan APB Nagari tepat waktu dapat menyelesaikan dengan segera.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Capaian kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja yang diinginkan, target dan realisasi capaian kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

**Tabel T-C 29 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021 / N-2	Tahun 2022 / N-1	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Hasil Review Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	50	100	100	86,04	-	100	100	
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Lembaga Yang Aktif / Jumlah Total Lembaga	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	20%	40%	60%	80%	100%	-	60	80	
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Sesuai dengan SK Menpan No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.M.PAN/2/2004 tentang survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,04	96,05	96,10	96,20	113,56	-	96,10	96,20	

Tabel T-C 29
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan koto baru	75	75	-	-	64.53	-	-	-	
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	-	-	90.85	-	-	-	
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan koto baru	6 Nagari	6 Nagari	-	-	6 Nagari maju dan berkembang	-	-	-	
		Persentase nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	40%	40%	-	-	33.3 %	-	-	-	
4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat nagari	Persentase Badan usaha milik nagari yang aktif	40%	40%	-	-	16.6%	-	-	-	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	-	-	100	100	-	-	-	-	
6	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-	-	60%	80%	-	-	-	-	
7	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	96,10	96,20	-	-	-	-	

Pada tahun 2021 terjadi perubahan capaian sasaran Kinerja pada Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sedangkan perhitungan LKJiP Tahun 2021 masih menggunakan Target Renstra Tahun 2016-2021. Pada tabel TC-22 di atas di gunakan capaian kinerja tahun yang terbaru yaitu Renstra 2021 – 2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Kecamatan Pangkalan Koto Baru sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Publik Masih belum maksimal
- 2) Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
- 3) Keterbatasan sarana dan prasraana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses efektifitas pelayanan
- 4) Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan

Berdasar Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Berdasarkan analisis gambaran Tupoksi Camat, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu

penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru antara lain :

Lokasi geografis, Luas Wilayah dan jumlah Penduduk menjadi hambatan pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

- a. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencakup beberapa OPD yang menjadi sampel dari OPD yang ada dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak termasuk OPD yang dinilai.
- b. Rendahnya Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu
- c. Belum Optimalnya Perkembangan Bumrag Nagari Di Kecamatan.
- d. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan

2.3.3 Dampak

Permasalahan dan Hambatan diatas tentu saja berpengaruh

terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai OPD dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Adapun Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah :

- a. Lokasi geografis yang berbukit, Luas Wilayah dan jumlah sebaran Penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- b. Prasarana wilayah yang masih rendah dan belum memadai yang masih perlu pembenahan
- c. rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- d. kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- e. Peluang untuk meningkatkan realisasi jumlah masyarakat yang akan terlayani dalam pengurusan administrasi Kecamatan.
- f. Perbaikan kinerja SDM Kecamatan yang didukung dengan anggaran dan sarana /prasarana yang tersedia.

Peluang

- a) RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

- b) Agenda pembangunan Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota
- c) Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- d) Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- e) Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- f) Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- g) Diklat peningkatan kualitas aparatur
- h) Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

2.3.5. Formula Isu Penting

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.

b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :

“Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah “

4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian

inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

5. Strategi Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS (Geografis Information System), yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada

b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.4.1 Proses yang di yang di lakukan membandingkan

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru terlihat bahwa ada

penambahan program maupun pengurangan program dan kegiatan

2.4.2 Alasan di lakukannya proses

Adapun alasan dilakukan proses penambahan Program dan kegiatan bertujuan untuk mengetahui manfaat atau kerugian dalam penambahan proram dan kegiatan tersebut

Tabel TC- 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai AKIP	65	2.130.286.975,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai AKIP	60	1.401.972.861,00	
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	48.989.149,00	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	60	19.753.500,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	1.696.761.284,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	60	1.199.338.187,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	4.245.225,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	-	-	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	7.750.379,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	60	4.753.400,00	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	102.811.280,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	60	23.196.000,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	53.542.500,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	-	-	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	107.012.158,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	60	93.881.774,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	109.175.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	60	61.050.000,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	71.638.413,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	8.199.600,00	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	9.851.820,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	61.786.593,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Indeks Kepuasan Masyarakat	74	8.199.600,00	

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65%	68.242.790,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	34.716.700,00	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65%	68.242.790,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	13.902.000,00	
2						Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	20.814.700,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	18.472.080,00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	-	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	11.982.080,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	-	
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	6.490.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	-	

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	5.864.870,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	20.401.000,00	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	5.864.870,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	20.401.000,00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65%	151.926.786,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	35.956.400,00	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65%	151.926.786,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	35.956.400,00	
					2.446.431.914,00						1.501.246.561,00

2.4.3 Temuan setelah proses

Adapun hasil temuan yang tertuang dalam renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah program yang tertuang pada rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang tertuang pada renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah 6 program,
2. Jumlah kegiatan yang tertuang pada rancangan awal RKPD adalah 15 Kegiatan.
3. Jumlah pagu pada rancangan awal RKPD Rp. **2.446.413.914,00** sedangkan pagu pada Hasil Analisis Kebutuhan Rp. **1.501.246.561,00**

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
- 2) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Nagari;
- 3) Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 4) Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Pangkalan Koto Baru maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru di Tahun 2023 tidak memiliki usulan program dan kegiatan dari pemangku Kepentingan.

Tabel TC- 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

OPD : Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN
PANGKALAN KOTO BARU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Pusat Tahun 2023 meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industry dan penguatan reset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Adalah :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah Kelembagaan yang aktif di Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Sasaran Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Sasaran Strategi adalah langkah–langkah yang berisi program–program indikatif

untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, adapun sasaran startegi Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk Rencana Kerja tahun 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala daerah terutama visi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2023 dapat dikelompokkan ke dalam 6 program dengan 15 Kegiatan bersifat rutin dan terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.3
Program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
(Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN
1	PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
1	KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Korodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2	KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
3	KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5	KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi SKPD
7	KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	1	Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8		KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
	1	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2		PROGRAM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	1	KEGIATAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	1	Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3		PROGRAM	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	1	KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	1	Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	2	KEGIATAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan
	1	Sub Kegiatan	1. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
4		PROGRAM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	1	KEGIATAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah

		1	Sub Kegiatan	1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
5			PROGRAM	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	1		KEGIATAN	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Nagari
		1	Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 3. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan

Terkait dengan Pendanaan program dan Kegiatan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru dikelompokkan ke dalam 5 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas layanan publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Rumusan Program dan Kegiatan Kec. Pangkalan Koto Baru pada tahun 2023 serta Perkiraan Maju tahun berikutnya.

T.B. 36

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Pangkalan Koto Baru
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2021)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	=	NIHIL	Sesuai perencanaan, penganggaran dengan realisasi Anggaran
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	=	NIHIL	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	=	NIHIL	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	=	NIHIL	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	=	NIHIL	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	=	NIHIL	

Dari program yang terdapat pada Kantor Camat Pangkalan Koto Baru terdapat kesesuaian antara Program dan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan tidak adanya hambatan yang berarti.

3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 (Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019)

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Memiliki Indikator Program yaitu nilai akuntabilitas kinerja kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 1.401.972.861 dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2024 sebesar Rp 2.017.593.161.

Kegiatannya adalah:

- Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Nilai indeks kepuasan masyarakat dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 8.119.600 dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2024 sebesar Rp 66.786.000

Kegiatannya adalah:

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 34.716.700 dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2024 sebesar Rp 93.889.934
Kegiatannya adalah:
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan
4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda di Kecamatan dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp - dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2024 sebesar Rp -
Kegiatannya adalah:
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 20.401.000 dan Pagu Prakiraan Maju tahun 2024 sebesar Rp 5.864.000.
Kegiatannya adalah:
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Memiliki indikator yaitu persentase nagari yang berkinerja baik dengan pagu indikatif tahun 2023 Rp 35.956.400 dan pagu indikatif tahun 2024 Rp 105.349.000
Kegiatannya adalah:
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

Penetapan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.00 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.00 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2.01																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renja Awal, Renja Akhir	Tersedianya dokumen Renja ,RKA,Perubahan RKA,DPA,DPA Perubahan,LKJIP,LKPJ,LPPD,SPIP,SAKIP		60 nilai	2 Dokumen 2 Dokumen	12 Dokumen	3,491,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akip	60 nilai		3,964,565
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Akip	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD RKA	Tersedianya dokumen Renja ,RKA,Perubahan RKA,DPA,DPA Perubahan,LKJIP,LKPJ,LPPD,SPIP,SAKIP		60 nilai	1 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen	3,056,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akip	60 nilai		3,610,761
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Nilai Akip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA	Tersedianya dokumen Renja ,RKA,Perubahan RKA,DPA,DPA Perubahan,LKJIP,LKPJ,LPPD,SPIP,SAKIP		60 nilai	1 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen	3,329,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akip	60 nilai		9,143,970
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Akip	DPA Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya dokumen Renja ,RKA,Perubahan RKA,DPA,DPA Perubahan,LKJIP,LKPJ,LPPD,SPIP,SAKIP		60 nilai	1 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen	2,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akip	60 nilai		10,325,172
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Akip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA	Tersedianya dokumen Renja ,RKA,Perubahan RKA,DPA,DPA Perubahan,LKJIP,LKPJ,LPPD,SPIP,SAKIP		60 nilai	1 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen	2,501,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akip	60 nilai		7,836,087
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akip	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP, SAKIP	Tersedianya dokumen Renja ,RKA,Perubahan RKA,DPA,DPA Perubahan,LKJIP,LKPJ,LPPD,SPIP,SAKIP		60 nilai	5 Laporan 5 Dokumen	12 Dokumen	4,381,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akip	60 nilai		14,108,600
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.00 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.00 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	Gaji ASN Kec. Pangkalan dan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		60 Nilai 74 Nilai	1 Tahun 16 Orang/bulan	12 bulan	1,195,197,187	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	60 Nilai 74 Nilai	1,674,123,391
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai AKIP Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan akhir Tahun	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		60 Nilai 74 Nilai	1 Laporan 1 Dokumen	12 bulan	4,141,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	60 Nilai 74 Nilai	11,237,415
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								4,753,400					5,000,000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai yang terlayani administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Disiplin dan sumber daya aparatur baju dinas		14 orang	10 Dokumen 12 Bulan	14 orang	4,753,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	14 orang	5,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								23,196,000					83,385,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket Alat Tulis Kantor	Tersedianya pelaksanaan administrasi umum kantor		60 Nilai	1 Paket 12 Bulan	12 bulan	6,427,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	60 Nilai	12,100,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai AKIP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket Cetak dan Penggandaan	Tersedianya pelaksanaan administrasi umum kantor		60 Nilai	1 Paket 12 Bulan	12 bulan	3,319,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	60 Nilai	10,285,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD paket penyediaan makan dan minum rapat serta Paket Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi SKPD	Tersedianya pelaksanaan administrasi umum kantor		60 Nilai	12 Laporan 12 Bulan	12 bulan	13,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	60 Nilai	61,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93,881,774					107,012,200

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.00 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.00 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 10000	Terlaksananya pelaksanaan surat menyurat,pembayaran air,listrik dan kebersihan kantor		60 Nilai	1 Laporan 12 Bulan	12 bulan	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	60 Nilai	1,415,700
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Pembayaran Tagihan air, Listrik dan Telepon serta Surat Kabar	Terlaksananya pelaksanaan surat menyurat,pembayaran air,listrik dan kebersihan kantor		60 Nilai	3 Laporan 12 Bulan	12 bulan	24,814,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	60 Nilai	31,605,200
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Penyediaan alat Kebersihan dan Jasa Tenaga Harian Lepas Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Terlaksananya pelaksanaan surat menyurat,pembayaran air,listrik dan kebersihan kantor		60 Nilai	1 Laporan 12 Bulan	12 bulan	68,567,624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	60 Nilai	73,991,300
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61,050,000					87,846,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional untuk 1 roda 4 dan 10 roda 2 dan Pembayaran STNK Roda 4 dan Roda 2	Terpeliharanya kendaraan dinas,peralatan mesin lainnya		60 Nilai	13 Unit 12 Bulan	12 bulan	61,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKP	60 Nilai	87,846,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								8,199,600					66,786,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								8,199,600					66,786,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan PATEN di Kecamatan	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor		74 Nilai	1 Laporan 12 Bulan	12 bulan	8,199,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	74 Nilai	66,786,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								34,716,700					93,889,934
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								13,902,000					68,291,300
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indek Kepuasan Masyarakat0	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksannanya kegiatan musrenbang		74 Nilai	12 Bulan	6 nagari	3,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat0	74 Nilai	15,014,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.00 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.62.00 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat0	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi yang Tersedia	Terlaksananya kegiatan musrenbang		74 Nilai	12 Laporan 12 Bulan	6 nagari	10,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat0	74 Nilai	53,277,300
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								20,814,700					25,598,634
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Indek Kepuasan Masyarakat0		Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan		074 Nilai		12 bulan	20,814,700			Indek Kepuasan Masyarakat0	074 Nilai	25,598,634
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								20,401,000					5,864,000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								20,401,000					5,864,000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Forum Forkopimca tang tersedia	Terlaksananya koordinasi FORKOPIMCA		74 Nilai	2 Dokumen 12 Bulan	12 bulan	20,401,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	74 Nilai	5,864,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								35,956,400					105,349,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								35,956,400					105,349,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	APB Nagari, LKPJ Nagari,Laporan Keuangan Nagari, Pernag, Perwanag, EPNAG, Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembuatan Produk Hukum Nagari, Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan Nagari		74 Nilai	12 Bulan 18 Dokumen	6 Nagari	12,309,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74 Nilai	19,989,000
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Nagari yang Mendapatkan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya pembuatan Produk Hukum Nagari, Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan Nagari		74 Nilai	1 Dokumen 12 Bulan	6 Nagari	10,861,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74 Nilai	42,069,000
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembuatan Produk Hukum Nagari, Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan Nagari		74 Nilai	6 Nagari 1 Laporan	6 Nagari	12,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74 Nilai	43,291,000
TOTAL									1,501,246,561					2,289,482,095

Dari tabel 4.1 diatas terdiri dari 5 program dengan pagu dana tahun 2023 Rp.1.501.246.561.00,- dan pagu perkiraan maju tahun 2024 Rp.2.289.482.095.00,-

Tabel 4.2
Rencana Target Kinerja IKU KD / IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2022	2023	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	50	100	
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	40%	60%	
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	96,10	

Pada tabel diatas menerangkan target Tahun 2022 dan 2023 dengan nilai target yang sama agar dapat memaksimalkan kinerja untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 4.3

Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	50	100	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	100	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	50	100	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	96,10	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,05	96,10	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,05	96,10	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	40%	60%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	40%	60%	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	96,10	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	96,10	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	96,10	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	96,10	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,05	96,10	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Pemberdayaan	40%	60%	

	Pemerintahan Desa	Kelembagaan Masyarakat Kecamatan			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	40%	60%	

Berdasarkan tabel di atas Rencana Kebutuhan Pendanaan kecamatan Pangkalan Koto Baru sesuai program dan kegiatan untuk tahun 2024 terjadi penambahan dari tahun 2023 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan agar meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan kecamatan.

Tabel 4.4
Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan kegiatan tahun 2023

No	Bidang Urusan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	
1.	Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.							
1.1	Kecamatan	6	1.501.166.561,00	2.443.933.517,00	15	1.501.166.561,00	2.443.933.517,00	
	Total	6	1.501.166.561,00	2.443.933.517,00	15	1.501.166.561,00	2.443.933.517,00	

Terkait dengan Pendanaan program dan Kegiatan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru dikelompokkan ke dalam 6 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas layanan publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Rumusan Program dan Kegiatan.

BAB V **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkoordinasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renja dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra kecamatan yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh masing-masing seksi dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Pangkalan, 04 Agustus 2022

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU



GUSNI HENDRI, S.STP.MPA

NIP. 19790831 199810 1 001



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO